
Jalan Menuju Tragedi: Sumba Barat 1995-1998

David Mitchell and Tuti Gunawan

Tulisan ini kami persembahkan kepada dua sahabat dan narasumber lama, almarhum Datu Ridi dan almarhum Temu Jawu, yang menunjukkan kepada kami bagaimana ancaman perang dapat ditangani di Sumba. Pada waktu perang perbatasan pada tahun 1972 antara Wanukaka dan Lamboya di pantai selatan Sumba Barat, Datu Ridi (Kepala Desa Weihura) memimpin kubu Wanukaka dalam konflik itu dan dipukuli babak-belur oleh polisi sebagai hukumannya. Temu Jawu (Kepala Desa Patiala Bawa) menolak ajakan untuk bergabung dengan kubu Lamboya dengan mengatakan bahwa ia siap berperang, begitu datang undangan resmi dari Pemerintah.

Kajian ini menyodorkan laporan tentang transisi dari era Orde Baru ke era Reformasi di Kabupaten Sumba Barat di propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).¹

Bagian pertama mengenai periode 1995-1998 menggambarkan riwayat pecahnya kekerasan yang luar biasa pada tanggal 5 November 1998, peristiwa yang segera dikenal sebagai Kamis Berdarah. Dalam perspektif nasional, peristiwa kekerasan ini hanyalah satu dari sekian banyak tragedi kekerasan yang meledak. Namun dari perspektif Sumba Barat, peristiwa ini merupakan suatu hal yang sangat tidak terduga. Peristiwa ini ternyata juga merupakan satu-satunya episode dan tidak berubah menjadi lingkaran kekerasan yang terus bergulir.

Bagian kedua mengenai periode 1999-2000 melukiskan bagaimana Sumba Barat mampu pulih dan kembali kepada cara-cara penyelesaian konflik politik tanpa kekerasan.

Terbebasnya sistem pemilu, partai politik dan dewan perwakilan rakyat yang diprakarsai oleh Presiden BJ Habibie, berhasil terlaksana di Sumba Barat. Dan sistem politik baru ini mencapai puncaknya dengan terpilihnya seorang bupati baru yang reformis pada bulan April 2000.

Ringkasan

Sebelumnya Kabupaten Sumba Barat adalah daerah yang tidak dikenal, tetapi pada bulan November 1998, kabupaten ini memulai debut penampilannya di halaman depan berbagai surat kabar nasional dengan pertikaian berdarah yang terjadi di jalan-jalan ibukota kabupaten, Waikabubak. Orang-orang dari dua sub-kelompok etnik yang bertetangga, Wewewa dan Loli², saling berperang dengan menggunakan parang, tombak dan batu, yang mengakibatkan paling sedikit 50 orang kehilangan nyawa dan lebih dari 90 rumah terbakar habis.

Seluruh bangsa membaca mengenai pemandangan mayat-mayat yang terbunuh dengan parang dan ditinggalkan begitu saja di jalan-jalan di kota. Jenazah ditinggal di tempat terbuka selama satu setengah hari, sementara pemerintah kabupaten mengalami kelumpuhan total. Para pegawai negeri mengungsi, semua toko tutup, dan kepala pemerintahan, Bupati Rudolf Malo, bersembunyi di asrama polisi. Saat itu masyarakat sipil berada dalam kelumpuhan total.

Lumpuhnya pemerintahan sipil ini berlangsung selama 48 jam, sampai Gubernur Propinsi NTT tiba untuk mengambil kepemimpinan. Gubernur Piet Tallo terbang langsung dari Jakarta dan tiba di kabupaten itu tak lama setelah pasukan Brimob (Brigade Mobil) diterjunkan ke daerah itu dari ibukota propinsi, Kupang. Ketenangan masyarakat kembali pulih. Mayat-mayat korban dikuburkan, pemerintah kembali memegang kendali pemerintahan dan mulai bekerja untuk menyembuhkan luka-luka akibat peperangan.³ Setelah perdamaian kembali ditegakkan, insiden kekerasan itu segera tersingkir dari perhatian nasional dan masyarakat Sumba Barat tinggal merenungkan bagaimana peristiwa yang begitu merusak itu dapat terjadi.

Insiden kekerasan itu ditampilkan oleh pers nasional sebagai pecahnya perang (antar) suku, seolah-olah orang secara misterius berbalik kepada perilaku primitif. Namun, pandangan ini tidak dipercayai oleh masyarakat Sumba Barat sendiri. Masyarakat Loli dan Wewewa bukanlah musuh bebuyutan. Perang tradisional di antara mereka pada masa kolonial dianggap masa lalu yang telah lama punah dengan masuknya agama Kristen dan meningkatnya pendidikan dan perkembangan ekonomi. Satu minggu sebelum peristiwa

Kamis Berdarah, sebagian besar masyarakat Sumba Barat tidak akan membayangkan bahwa perang antar suku itu bisa berkobar lagi.

Sementara pers nasional sama sekali tidak mengemukakan penyebab langsung dari insiden tersebut, koran ibu kota propinsi, Pos Kupang, berkali-kali dengan cermat menyiratkan atau menyatakan secara langsung bahwa insiden itu dipicu oleh konflik antara tokoh-tokoh terkemuka di dalam pemerintahan.⁴ Tetapi di kalangan awam di Waikabubak, tidak ada pembicaraan yang samar-samar, yang ada hanyalah perbincangan yang terus terang mengenai di mana letak kesalahannya. Di sini, sama sekali tidak ada keraguan bahwa penyebabnya terletak pada rusaknya sama sekali hubungan antara Bupati yang berasal dari kalangan militer, Kol. (AU) Rudolf Malo, dan pemimpin Golkar dari kalangan sipil, yang sekaligus Ketua DPRD II, T. Lero Ora SH. Dengan kian meningkatnya konflik di antara mereka, mereka memobilisasi para pendukung mereka, sebagian besar menurut garis keluarga dan loyalitas etnik, yang akhirnya menyebabkan perang di jalan-jalan kota Waikabubak.

Latar Belakang—Warisan Orde Baru

Pada awalnya, kejatuhan Soeharto tidak banyak menciptakan perubahan di Sumba Barat. Setelah pengunduran diri Presiden pada tanggal 21 Mei 1998 tidak satupun kelompok oposisi memegang tampuk kekuasaan dan hanya sedikit harapan bahwa pengganti pilihan Soeharto, BJ Habibie, akan banyak melakukan penggantian para pejabat di daerah tersebut. Sebaliknya, muncul dugaan bahwa ia akan menggunakan kekuasaannya untuk melanjutkan kekuasaan elit lama, terutama lewat partai Golkar. Tuntutan masyarakat akan perubahan akan masih bisa dinetralisir dan diabaikan seperti pada zaman Orde Baru. Di kebanyakan wilayah Indonesia, polisi, pengadilan, dan kejaksaan masih merupakan badan-badan yang mereka kuasai. Badan-badan ini masih bisa diminta untuk melindungi pejabat yang berkuasa dari tuntutan hukum atas berbagai perbuatan korup atau yang melanggar hukum yang mungkin pernah mereka lakukan.

Sungguhpun demikian, “reformasi” versi Habibie ada meniupkan hidup baru ke dalam politik pemilu. Reformasi versi Habibie itu membuka jalan bagi partai-partai politik baru untuk memenangkan kursi, dan mengembalikan kekuasaan kepada dewan-dewan perwakilan rakyat. Selain itu, kontrol ketat atas pers dicabut. Namun dampak sepenuhnya dari semua perubahan ini baru terjadi dengan diadakannya pemilu pada bulan Juni 1999 dan setelah itu pelantikan Presiden baru pada bulan November 1999. Di Kabupaten-Kabupaten dan Propinsi, baru kemudian lagi terjadi pergantian pejabat-pejabat. Di berbagai kabupaten, baru dua tahun atau lebih setelah jatuhnya Soeharto, Bupati baru yang reformis mulai memegang kekuasaan.

Akan tetapi, ketangguhan kekuatan Orde Baru di Sumba Barat bukan terletak pada kemampuannya melakukan penindasan, melainkan pada keberhasilannya dalam pembangunan dan menjaga ketenteraman masyarakat selama lebih dari 30 tahun. Karena kekuasaan dimonopoli oleh Orde Baru, siapapun orang sipil yang ingin turut ambil bagian dalam proyek pembangunan pada tingkat politik harus melakukannya melalui organisasi Golkar. Dengan cara ini, Golkar menjadi tempat pengabdian banyak orang yang berkemampuan dan idealis, dan Golkar memperoleh legitimasi atas kekuasaannya karena rangkaian panjang prestasi yang dicapainya.

Melihat gambaran peta politik di tingkat lokal ini, para pejabat Golkar yakin akan kedudukan mereka yang kuat. Mereka memang khawatir bahwa dua partai besar yang reformis, yaitu PDI-P dan PKB, akan dapat menguasai mayoritas kursi di Jawa dan Bali, namun kekuatan Golkar ada di daerah-daerah luar Jawa seperti Sumba, dan mereka punya cukup alasan untuk merasa yakin bahwa pemilu yang akan datang akan mereka menangkan.

Sumba Barat memiliki banyak alasan untuk puas dengan ideologi pembangunan Orde Baru. Karena merupakan kabupaten yang relatif miskin dan terbelakang, Sumba Barat dari tahun ke tahun menerima subsidi pemerintah pusat yang cukup besar jumlahnya untuk membiayai pembangunannya. Dan karena tidak memiliki sumber daya alam yang besar, daerah ini tidak menarik bagi orang-orang luar yang memiliki kepentingan untuk ‘memangsa’.

Karena tidak adanya kepentingan luar itu, Sumba Barat selalu dibiarkan hidup dengan kepemimpinan politiknya sendiri yang asli daerah, seperti terlihat dalam urutan kepala pemerintahan daerah sejak tahun 1955 hingga 2000 (tabel 1).

URUTAN PEJABAT BUPATI SUMBA BARAT 1955-2000⁵	
Nama	Latar Belakang
DAERAH PULAU SUMBA 1955-1958 Leisu Jaga Dapawole	Loli Anak Raja Loli
DAERAH SUMBA BARAT 1958-1961 Lede Kalumbang	Laura Anak Raja Laura
1962-1973 Umbu Remu Samapaty	Anakalang Anak Raja Anakalang
1973-1978 Drs. Umbu Tonga	Memboro Sekwilda NTT
1978-1984 Dominggus Pandango SH	Tanarighu Kol. AURI
1985-1995 Drs. Umbu Djima	Anakalang APDN Kupang
1995-2000 Rudolf RL Malo	Wewewa Kol. AURI

Pada dua dekade pertama tahun 1955-1975, kepemimpinan politik diambil dari elit tradisional. Dua Bupati pertama mengenyam pendidikan Belanda yang baik dan dari semula merupakan pendukung gerakan kemerdekaan. Keduanya adalah anak raja di masa kolonial, namun pada umumnya diakui bahwa prestasi merekalah yang membawa mereka pada jabatan itu, bukan status yang mereka warisi. Sejak 1975, kekuasaan berpindah ke generasi lebih muda putra daerah Sumba Barat. Mereka ini adalah orang-orang yang telah membuktikan kemampuan mereka di daerah lain dalam birokrasi nasional, sipil atau militer, dan kemudian pulang kampung untuk memimpin pemerintahan daerah.⁶ Cukup penting juga bahwa tabel itu memperlihatkan bahwa kepemimpinan belum didominasi oleh sesuatu suku bangsa yang menonjol, tetapi rupanya terbuka untuk siapa saja.

Sumba Barat juga bebas dari konflik besar yang didasarkan atas agama dan suku. Masyarakat Muslim besarnya kurang dari 2% dari jumlah penduduk dan perbedaan terbesar terdapat di antara agama Protestan dan Katolik. Pada tahun 1993 angka-angka resmi menunjukkan agama Protestan 45%, Katolik 25%, Animis 28%, Islam 2%, Budha 0,5%.⁷ Penganut agama Protestan lebih banyak dan secara politik lebih dominan, tetapi orang Katolik pada umumnya cukup puas terwakili secara proporsional, dan persaingan antar agama umumnya tidak menjadi runcing. Selain masyarakat etnik asli Sumba, terdapat minoritas keturunan Tionghoa yang bergerak dalam bidang perdagangan dan umumnya memiliki kesamaan afiliasi religius dengan orang-orang asli Sumba. Ada juga masyarakat pendatang yang berjumlah kecil dari pulau-pulau yang berdekatan dengan Sumba (Roti, Sabu, Alor, Flores, Belu, Bima, Ende, Bali, Ambon), namun dari kelompok ini tidak ada yang ikut dalam perebutan kekuasaan politik.

Lain lagi halnya dengan larangan perang tradisional antara berbagai wilayah politik yang sering terjadi di Sumba pada masa pra-kolonial. Ini merupakan persoalan lama yang telah dicoba diatasi sejak tahun 1916 oleh pemerintah kolonial Belanda dalam menanamkan kekuasaan yang mempersatukan berbagai wilayah dan menegakkan *Pax-Neerlandica*.⁸ Elit tradisional diangkat sebagai pejabat pemerintah, guru-guru sekolah atau guru-guru Injil, dan berbagai jabatan lainnya dalam masyarakat kolonial.⁹ Semua wilayah yang besar mempunyai wakilnya, dan perasaan sama-sama memiliki akses pada kekuasaan sudah tertanam pada masa kolonial Belanda itu.

Keadaan ini berhasil dipertahankan sejak kemerdekaan sehingga identitas etnik umumnya terbenam di bawah identitas yang lebih besar, sebagai orang Sumba atau orang Indonesia. Konflik tanah antara suku-suku yang berbatasan telah ada sejak kemerdekaan, dan menyulut mobilisasi etnik, tetapi tiap kali konflik terjadi, dengan cepat dipadamkan oleh intervensi dari Pemerintah Kabupaten. Elit politik selalu berpendapat sama dalam mengatasi secara cepat ketegangan etnik dan memecahkannya dengan tindakan tegas dan jalan keluar yang bersifat praktis.

Antara masyarakat Wewewa dan Loli yang bertetangga dan yang bertutur dalam bahasa yang saling dimengerti, hanya terdapat sedikit ketegangan. Ketegangan ini terus hidup terutama karena masyarakat Wewewa yang rajin bangga akan keberhasilan dan kemakmuran mereka, dan kadang-kadang membuat komentar-komentar yang merendahkan mengenai tetangga mereka orang Loli. Tetapi, di samping adanya persaingan ini, ada jalinan yang kuat karena perkawinan dan hubungan darah di antara kedua suku ini, dan biasanya mereka bekerja bersama dalam berbagai hal, dalam kegiatan gereja, pendidikan, kesehatan dan pemerintahan.

Pada awalnya, hubungan antara Bupati Malo dan Ketua DPRD II, T. Lero Ora, berjalan cukup baik dan ketika Bupati Malo memulai jabatannya pada bulan April 1995, tidak ada indikasi adanya ketegangan di antara mereka. Lero Ora sudah menjadi anggota DPRD II selama satu periode, dan telah memberikan suaranya untuk pengangkatan Malo. Secara kebetulan, Lero adalah ipar dari Bupati sebelumnya, Umbu Djima, yang telah menyelesaikan dua masa jabatan (yang merupakan batas maksimum) dan yang dengan senang menyerahkan jabatan itu kepada penggantinya.¹⁰

Kolonel Angkatan Udara menjadi Bupati

Persaingan antara orang sipil dan militer untuk jabatan Bupati diatur oleh kesepakatan di tingkat propinsi¹¹, yang menyatakan bahwa pihak militer berhak menguasai 4 dari 12 jabatan Bupati di seluruh propinsi NTT, sementara rekan sipilnya, Golkar, menguasai 8 jabatan di kabupaten-kabupaten selebihnya. Kesepakatan ini sebagian didasarkan pada pertimbangan keamanan. Kupang, yang menjadi ibukota propinsi, dan Atambua, yang secara politik bersifat sensitif karena berbatasan dengan Timor-Timur, biasanya dipimpin oleh Bupati dari

kalangan militer, demikian juga dua kabupaten lainnya, biasanya satu di Sumba dan satunya lagi di Flores.

Kontrol atas pengangkatan Bupati di kabupaten seperti Sumba Barat ini tidak didasarkan pada pertimbangan keamanan, tetapi lebih pada pembagian kekuasaan di antara kedua mitra ini. Jabatan Bupati di Sumba Barat bukanlah jabatan yang sangat basah. Orang yang menduduki jabatan itu bisa berharap mengumpulkan kekayaan dari kendali mereka atas sejumlah kontrak yang diberikan oleh pemerintah kabupaten. Namun, NTT adalah propinsi yang miskin, dan bahkan di kabupaten-kabupaten yang agak kaya, seperti Sumba Barat, kesempatan untuk korupsi jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kedudukan Bupati di daerah Indonesia lainnya yang lebih makmur. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan mengapa jabatan Bupati Sumba Barat telah dua kali dipegang oleh Angkatan Udara, sebagai kelompok yang dianggap paling sedikit kekuasaannya di kalangan militer.

Pada tahun 1995, Golkar di Sumba Barat berharap bahwa pilihan posisi Bupati akan diserahkan kepada mereka. Mereka telah memilih pejabat senior yang disegani, Thimotheus Langgar S.H., untuk jabatan itu. Thimotheus Langgar berasal dari kecamatan Wewewa Barat yang merupakan bagian dari Sumba Barat, dan setelah sukses berkarir di birokrasi propinsi di Kupang, ia dipandang sebagai tokoh terpandai dari generasinya. Namun, pihak militer memiliki gagasan yang lain, dan mereka masih menginginkan Sumba Barat lagi.

Pihak militer berhasil mencapai hal ini dengan mengkartu mati pencalonan Langgar dengan klaim bahwa ia tidak sehat secara politik karena ia 'kurang bersih lingkungan'. Dalam istilah ini tersirat keterlibatan seorang kerabatnya dalam partai komunis pada era pra-1965.¹² Tak seorangpun, termasuk di kalangan militer sendiri, yang percaya jika dikatakan bahwa Thimoteus Langgar bukan seorang pegawai negeri yang setia, tetapi siapa yang berani menentang penyalah-gunaan peran keamanan ini? Calon sipil lainnya sadar bahwa mereka mungkin menerima perlakuan yang sama jika mereka mencalonkan diri, maka orang-orang sipil di Golkar bersedia mundur, untuk menunggu giliran berikutnya.¹³

Calon dari kalangan militer, Kolonel Rudolf Malo, dilahirkan di Sumba Barat dan pergi ke Jawa untuk menjalani pendidikan sekolah menengah. Setelah menjadi anggota Angkatan Udara, ia naik ke pangkat kolonel dan menjadi kepala urusan logistik di markas angkatan

udara yang besar di Baucau, Timor-Timur, sebelum akhirnya menjadi anggota DPRD II di Kupang selama satu masa jabatan. Kepribadiannya memancarkan antusiasme dan keyakinan diri dan tampaknya ia akan menjadi Bupati yang kompeten.

Rudolf Malo sendiri mulai menduduki jabatan itu dengan ambisi menyala untuk menciptakan perubahan radikal di daerah yang dianggapnya sangat terbelakang dan tidak beradab di pelosok Indonesia ini. Ia berasal dari keluarga yang tidak berkedudukan tinggi di Wewewa, dan karenanya itu ia tidak bangga atas nilai-nilai tradisional Wewewa. Ia lama hidup bertahun-tahun dalam lingkungan militer yang bersih, nyaman, teratur, dan merasa malu manakala rekan-rekannya di kalangan tentara menyindir tentang masyarakat Sumba yang dianggap primitif. Ia seorang yang sangat bersemangat dan cenderung mengatakan apa yang ada dalam pikirannya tanpa tedeng aling-aling, sehingga dalam pidato-pidatonya di muka umumpun terkadang terlontar komentar-komentarnya tentang orang-orang Sumba di kampung yang dianggap menghina dan menyinggung mereka.

Isterinya berasal dari Jawa Barat. Karakternya yang penuh semangat dan karismatik membuatnya segera dikelilingi oleh sekelompok pendukung yang antusias, yang tergabung dalam Dharma Wanita, organisasi untuk para isteri pegawai. Ia memperkuat antipati suaminya terhadap berbagai aspek kehidupan desa masyarakat Sumba. Meski ia seorang Kristen, namun ia sangat tidak suka pada peternakan babi yang memiliki peran sentral dalam ekonomi tradisional. Suami-isteri itu memugar rumah dinas dengan cara yang menjadi simbol dari upaya mendefinisikan kembali dan memodernkan identitas masyarakat Sumba. Para penghuni rumah dinas Bupati sebelumnya selalu memelihara kuda dan babi di halaman belakang rumah sesuai dengan tradisi desa di Sumba, namun Ibu Malo menganggap kebiasaan ini kotor dan tidak sesuai dengan kehidupan modern, sehingga hewan-hewan ternak itu dihilangkan sama sekali. Pemugaran yang dilakukan sebenarnya tidak banyak dan tidak terlalu megah, tetapi beberapa perlengkapan yang baru, seperti bar untuk menyuguhkan minuman keras, juga merupakan pemisahan yang signifikan dengan masa lalu, dan menyinggung kebiasaan yang sebelumnya berlaku dari Gereja Sumba yang bertradisi Calvinis, yang pantang minum alkohol.

Politik Komando dan Politik Hubungan

Dari semua perubahan simbolik ini, antipati terhadap babi memiliki dampak terluas. Bupati Malo menolak untuk ambil bagian dalam tukar menukar tanda mata, biasanya berupa babi, kain adat dan kuda, yang secara adat menjadi bagian dari hubungan di antara sesama orang Sumba dari segala kalangan. Karena Bupati selalu orang asli Sumba Barat, maka banyak elemen hubungan sosial tradisional diperluas ke dalam hubungan antar pejabat pemerintah. Seorang Bupati bisa menduga akan diberi tanda mata tradisional berupa kain adat, atau kuda atau babi oleh para Camat, yang dengan demikian membumbui hubungan yang formal dengan dimensi tambahan berupa saling memberi dan menerima, dan saling berhutang budi. Tapi Bupati Malo sama sekali tidak menyukai hubungan seperti itu. Ia bertekad untuk membawa perubahan ke dalam budaya birokrasi pemerintahan. Dalam pandangannya, hubungan komando ala militer adalah gaya yang seharusnya dipakai. Keharusan untuk membangun hubungan secara pribadi membuang-buang tenaga dan tidak perlu, dan kian memperuwet tugas pemerintahan dengan berbagai kewajiban yang menghinggapi hirarki, yang hanya akan mempersibuk seorang Bupati yang sudah sibuk.¹⁴

Para pendukung Bupati Malo percaya bahwa politik komandonya akan menghasilkan administrasi pemerintahan yang lebih efisien, dan mereka menunjuk kepada betapa lamban dan tidak praktisnya politik hubungan adat yang sebelumnya ada itu. Bagi kalangan dagang, politik komando itu juga memudahkan, karena mereka bisa memfokuskan usaha mereka untuk mendapatkan kontrak dari Pemerintah kepada Bupati Malo saja. Mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengambil hati para birokrat yang lebih rendah. Di kalangan pengusaha Tionghoa, Bupati Malo dijuluki 'Fokker Merah' atau 'Joker'.¹⁵ Perwira Angkatan Udara ini disamakan dengan pilot pesawat tempur Jerman, Baron Merah, yang menembak semua penentang rencana yang didukungnya, atau seperti kartu joker yang bisa mengkartu mati semua kartu lainnya. Tingkat korupsi berkurang selama paruh terakhir masa jabatan Bupati Malo karena krisis moneter mengurangi jumlah anggaran pemerintah yang dapat dibelanjakan, dan pembaruan-pembaruan yang diperkenalkan oleh Presiden Habibie membuat persaingan harga lebih penting daripada sebelumnya. Akan tetapi Bupati Malo merasa bahwa ia berhak mengumpulkan keuntungan yang cukup besar bagi berbagai ikhtiar yang dilakukannya, dan ia tidak segan mengungkapkan sudut pandang ini.

Bupati Malo memiliki energi yang luar biasa dan koneksi yang mengesankan di Jakarta dan Bandung, yang mampu dimanfaatkannya untuk kepentingan Sumba Barat. Selama masa jabatannya, masyarakat senang dengan bertambahnya pemberitaan tentang Sumba Barat di surat-surat kabar atau televisi nasional. Masa-masa ini juga merupakan periode perbaikan prasarana perdagangan. Kapal feri baru, yang berlayar dari Sumba Barat ke Bima dua kali seminggu, membuka pasar baru, terutama untuk produk pertanian dari dataran tinggi Wewewa yang curah hujannya tinggi, yang laris dijual di Bima yang lebih kering.¹⁶ Di bidang inilah ia bisa mengklaim bahwa ia benar-benar berprestasi, namun kalangan elit lama di Waikabubak mengeluh secara sinis mengenai gaya pemerintahannya. Mereka mengatakan bahwa Bupati Malo gemar memakai istilah komando yang bersifat militer (*“program pembangunan dikomandoi oleh Bupati Rudolf Malo”*), agar ia bisa mengatakan bahwa ialah yang berjasa dalam berbagai prestasi program pemerintah, padahal program-program itu telah lama dirancang dan banyak orang yang telah turut memberikan andilnya.

Sekutu Mulai Berselisih

Karena gaya komandonya dalam memerintah, muncul ketegangan antara Bupati Malo dan DPRD-II. Kendati dewan didominasi oleh para anggota Golkar yang memandang diri mereka sebagai bagian dari pemerintah kabupaten, sebelumnya para anggotanya biasa diajak berkonsultasi dan dihargai pendapatnya. Namun Bupati Malo tidak berminat pada nasihat mereka dan setelah Pemilu 1997 ia memutuskan untuk mengambil kendali DPRD II dengan mengusahakan agar seorang perwira militer yang berpikiran sama dengannya diangkat sebagai Ketua.¹⁷ Organisasi Golkar di tingkat lokal memandang upaya ini sebagai pelanggaran kesepakatan yang memberikan hak kepada mereka untuk mencalonkan seorang Ketua jika mereka berhasil mengantongi 90% suara dalam pemilu. Kali ini mereka tidak bersedia tunduk pada kontrol militer, dan setelah pergumulan yang pahit mereka mengangkat calon mereka sendiri, T. Lero Ora SH, untuk menduduki jabatan itu.

Bupati Malo tidak berupaya menanggapi konflik yang memanas ini dengan mencari kompromi dan pemecahan politik. Ia justru menganggap tentangan itu menghina dirinya pribadi dan menanggapinya secara keras, sehingga saingan menjadi musuh, dan memperdalam polarisasi, baik di dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat luas.

Ketika ia semakin terisolasi dari orang-orang yang telah menjalani karir mereka bekerja di Sumba Barat, Bupati Malo membentengi dirinya sendiri dengan pembantu-pembantu yang bisa diharapkan untuk sepakat dengannya, dan menjadi kian terasing dari para elit tradisional yang lama berkarir di Sumba.

Bupati Malo tidak terpuak oleh perkembangan ini. Karena ia yakin bahwa ia membawa peradaban untuk sesama orang Sumba yang terbelakang, ia sering menerangkan penentangan terhadap dirinya dengan kisah Nabi Isa yang membalikkan meja para pedagang di dalam kuil. Tentangan terhadapnya lebih besar, ujarnya, karena ia pembaharu yang lebih giat daripada Bupati-Bupati sebelumnya.¹⁸

Banyak orang yang sebelumnya menerima pencalonannya sekarang menyesal telah memilihnya. Sebelumnya mereka terkesan oleh Malo karena ia adalah seorang asli Sumba yang berhasil meraih pangkat Kolonel, yang kemudian diambil sebagai bukti tingkat kemampuan membuat penilaian dan kecakapan memimpin administrasi (*"kami tergiur oleh kolonelnya"*). Tapi sekarang mereka menyadari bahwa di dalam Angkatan Udara pekerjaan Bupati Malo terbatas dalam lingkungan birokrasi Angkatan Udara, dan tidak berpengalaman menghadapi masyarakat dan persaingan politik yang serius. Mereka tadinya menerima perlunya membagi kue kekuasaan. Sekarang mereka mulai menyadari bahwa dengan menerima pencalonan Malo, mereka telah mengangkatnya ke tingkat yang melebihi batas kemampuannya.¹⁹

Bahkan salah satu proyek Bupati Malo yang paling bernilai berakhir dengan kian memburuknya kebencian antara Bupati Malo dengan para pejabat Golkar. Kampanyenya untuk mereformasi peternakan jelas baik. Ada dua bagian dalam pelaksanaan kampanye itu, yaitu menurunkan jumlah sapi dan kerbau yang disembelih pada upacara pemakaman dan pesta tradisional, dan mengurangi jumlah pencurian dengan menggalakkan pendaftaran pemilik sapi, kerbau dan kuda. Sistem yang ada dalam pendaftaran pemilik hewan-hewan ini telah dirusakkan oleh orang-orang kaya yang memiliki pengaruh atas polisi dan pegawai peternakan. Malo membawa masuk Brimob dari Kupang, karena sebagai orang luar kecil kemungkinan mereka merasa terintimidasi oleh gengsi elit-elit lokal. Akan tetapi banyak kasus yang tidak dapat digolongkan hitam atau putih, karena pendaftaran hewan itu memakan biaya tinggi dan berbelit-belit, terutama bagi hewan yang tidak dipelihara terus

oleh pemiliknya tetapi dipertukarkan terus-menerus sebagai benda perdagangan adat. Diperlukan kepekaan dan keluwesan bila reformasi diharapkan memperoleh dukungan masyarakat, tetapi inilah yang tidak dimiliki oleh Rudolf Malo maupun Brimob. Seluruh usaha ini menerbitkan banyak kebencian terhadap Bupati Malo dan memperkuat pandangannya bahwa usaha-usahanya yang baiklah yang menuai permusuhan dari para elit lokal berkepalanya yang tidak akan berubah mengikuti jaman.

Menjelang akhir 1998 Bupati Malo mendekati akhir lima tahun masa jabatannya, dan ia sangat menginginkan untuk dipilih kembali untuk masa jabatan kedua. Namun para politisi sipil dari Golkar memegang peranan dalam persoalan ini karena jumlah mereka terbanyak di DPRD II. Kekuatan mereka untuk memilih Bupati meningkat banyak dalam perubahan-perubahan baru yang dicanangkan oleh Habibie dan banyak di antara mereka yang secara pribadi memutuskan untuk sebisa mungkin mencegah terpilihnya Malo untuk kedua kalinya.

Isu Pemicu

Maka demikianlah pada akhir Oktober 1998, ketika tuntutan 'reformasi' pertama kali muncul di Sumba Barat, sudah ada banyak ketegangan dan ketidakpercayaan di antara Bupati Malo dan Ketua DPRD Lero. Persoalan yang tiba-tiba mengemuka di depan publik adalah korupsi dalam proses penerimaan pegawai negeri baru, yang sejak lama telah menjadi persoalan di Sumba, seperti juga di daerah-daerah lain di NTT. Dalam hal ini, ketika nama-nama calon pegawai yang lulus diumumkan, salah seorang di antara mereka yang lulus mengaku kepada teman-temannya, yang kemudian diulang di muka umum, bahwa sebenarnya ia tidak mengikuti ujian penerimaan pegawai negeri. Lewat cara yang dikenal sebagai 'praktek joki', seseorang lain mengambil tempatnya dan mengikuti ujian tersebut.²⁰

Para pengikut ujian yang gagal membentuk kelompok yang bernama 'Forum Pemuda Demokratis Pencinta Reformasi', dan kemudian menggelar demonstrasi yang diikuti 30 orang pada hari Senin 26 Oktober. Mereka diterima pertama kali oleh Lero sebagai Ketua DPRD II dan kemudian oleh Bupati Malo sebagai kepala eksekutif pemerintahan. Sebagai seorang politisi profesional, tentu saja Lero mengatakan bahwa ia bersimpati pada mereka, namun ia hanya memiliki pengaruh, bukan kekuasaan. Malo-lah yang memegang kekuasaan eksekutif untuk merespon tuntutan para demonstran. Malo mengambil posisi defensif,

dengan terlebih dulu menunjukkan bahwa sebagian besar persoalan ini terletak di Kupang karena hal ini adalah persoalan yang terjadi di seluruh propinsi. Ia tidak mengakui bahwa ada sebagian persoalan, seperti pengawasan dalam ruang ujian, yang sebenarnya termasuk wilayah kontrolnya. Dengan penuh amarah dia mengatakan bahwa persoalan tersebut bukanlah tanggung jawabnya, dan gaya bicaranya berubah menjadi intimidatif dengan menyatakan bahwa para demonstran itu dipengaruhi oleh musuh-musuh negara.²¹

Di masa silam strategi semacam ini efektif, namun dalam iklim politik yang baru, demonstrasi memiliki legitimasi baru. Dari hari ke hari jumlah demonstran semakin banyak dan kian mengintensifkan tuntutan mereka. Pada hari Kamis, 29 Oktober, demonstrasi yang terjadi jauh lebih besar, diikuti oleh sekitar 200 orang dan mereka menuntut pengunduran diri Kepala Urusan Pegawai, Daud Pakerang, seorang pejabat senior yang berasal dari kecamatan Wewewa seperti Bupati Malo. Para demonstran menunjukkan adanya banyak orang Wewewa yang memiliki hubungan dengan Bupati dan Kepala Urusan Pegawai, yang terwakili secara tidak proporsional di antara calon-calon pegawai negeri baru.²²

Pada hari Sabtu, 31 Oktober eskalasi semakin memuncak dan para demonstran menuntut pengunduran diri Bupati Malo sendiri. Kali ini para peserta demonstrasi adalah orang tua dan kerabat para peserta ujian, yang selama bertahun-tahun mengirim uang ke Jawa dan Bali untuk membiayai sekolah mereka yang sekarang tidak mendapat pekerjaan karena dicurangi. Para peserta ujian yang bersikap sopan, yang ingin terpilih sebagai pegawai negeri tidak nampak dalam demonstrasi itu. Mereka tidak bersedia untuk mengambil peran sebagai juru bicara kerumunan orang yang kasar dan gaduh ini. Bentuk normal demonstrasi, yaitu menuntut tatap muka dengan Bupati, dikuti, namun pidato-pidato formal segera berubah dan menjadi tanya jawab yang penuh kemarahan. Bupati Malo menyelip masuk ke dalam gedung.²³

Kerumunan massa itu menggedor-gedor jendela, memanggil Bupati Malo untuk keluar lagi dan menemui mereka. Mereka berseru, “Giani Mete! Giani Mete!” yang secara harfiah berarti “Di mana Mete?”, tetapi memakai nama kecil Bupati Malo secara sengaja untuk mencemoohnya. Ini bentuk bahasa yang biasa digunakan oleh orang tua yang marah terhadap anaknya yang nakal, namun bersifat menyinggung dan provokatif jika ditujukan pada orang dewasa yang berkedudukan tinggi.²⁴

Mungkin Bupati Malo sebaiknya menganggap kata-kata itu sebagai angin lalu, kata-kata penghinaan orang yang tidak berpendidikan, namun ia sangat tersinggung dan bersikap emosional dalam menghadapi perkembangan ini.²⁵ Dan ia menuding Ketua DPRD Lero sebagai biang keladi perilaku massa itu. Ia yakin Lero terlibat dalam mengorganisir atau mendorong demonstrasi. Dalam pandangan Malo, jika pun Lero tidak bertindak sampai kesitu, ia tetap bersalah karena tidak memberi dukungan penuh kepada pemerintah eksekutif.²⁶ Sore hari itu juga, Bupati Malo pergi ke kampungnya guna memobilisasi para pendukungnya untuk membela nama baiknya.

Mengorganisir demonstrasi untuk mengintimidasi lawan politik adalah hal lumrah dari kampanye pemilu yang dilakukan oleh Golkar dan merupakan suatu hal yang syah dalam budaya politik Orde Baru. Memobilisasi keluarga dan para pendukung sesama etnik yang dilakukan oleh seorang Bupati untuk menentang Ketua Golkar merupakan hal baru, namun hal itu wajar muncul dari budaya politik di masa-masa akhir Orde Baru.

Keluarga dan pendukung Bupati Malo menyelenggarakan demonstrasi tandingan pada hari Senin tanggal 2 November. 12 truk dengan penumpang sedikitnya 500 orang yang dilengkapi dengan berbagai spanduk tiba di ibukota kabupaten dari kampung halaman Malo di Wewewa.²⁷ Para demonstran dipersenjatai dengan parang, tombak, dan batu. Mereka distop dan dilucuti oleh polisi, yang menyita senjata mereka, mengosongkan bekal bebatuan dari bak truk, mengawal mereka ke gedung yang dituju dan memastikan agar mereka tidak bertemu dengan para pemrotes.²⁸ Ketika bertemu dengan pejabat pemerintah mereka menjelaskan bahwa kedatangan mereka dimaksudkan untuk membela kehormatan Bupati dan menuntut polisi dan tentara mengambil tindakan tegas untuk mencegah pelecehan lebih lanjut terhadapnya. Malo memberi tanggapan secara wajar kepada mereka, menyatakan terima kasihnya atas dukungan mereka, tetapi menyatakan bahwa sebagai Bupati ia harus berdiri di atas semua kepentingan golongan. Namun bersamaan dengan permintaan luhur yang ia ajukan di atas podium, para pendukungnya mengerumuni jendela-jendela kompleks gedung pemerintahan dan menyerukan penghinaan gaya mereka sendiri “Giani Toda? Giani Toda?”, berteriak-teriak memanggil nama kecil Lero. Sebagai pelengkap mereka menambah seruan “Giani Lede? Giani Gawi? Giani Bongo?”, menggunakan nama kecil para pejabat senior yang berasal dari Loli untuk menghina mereka.²⁹

Mobilisasi

Setelah terjadi saling menghina ini konflik segera berubah. Isu-isu politik menjadi isu perseorangan, dan isu perseorangan itu dengan cepat dirubah menjadi isu suku. Sekarang, kehormatan dua tokoh publik terkemuka ini menjadi taruhannya, dan masyarakat Wewewa seolah-olah diminta untuk berada di belakang pemimpin mereka, Bupati Malo, sementara masyarakat Loli diminta untuk berdiri di belakang Ketua Lero.

Mobilisasi dimulai pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober ketika para pendukung Bupati Malo mulai berkumpul di markas keluarga Malo di Ujung Padang, 12 kilometer sebelah barat Waikabubak. Setelah demonstrasi bersenjata dari para pendukung Malo pada tanggal 2 November itu, gerombolan massa juga berkumpul di markas keluarga Lero Ora di Dedekadu, yang hanya berjarak 3 kilometer sebelah timur pusat kota. Kedua tempat berkumpul itu ada di pinggir jalan dan proses mobilisasi sangat jelas terlihat oleh semua orang yang melewatinya. Ada banyak orang yang berkumpul, hewan disembelih sebagai jamuan untuk mereka, dan berderet-deret kendaraan di parkir di sepanjang jalan.

Banyak orang teringat sengketa tanah di masa lalu yang menjurus pada munculnya ketegangan antara Wewewa dan Loli. Pasca kemerdekaan telah muncul tiga insiden perkelahian di wilayah perbatasan. Dalam semua kasus tersebut, perselisihan di tingkat desa mengenai kepemilikan tanah di daerah perbatasan berkembang menjadi perkelahian antar desa, tetapi konflik di semua kasus tersebut berhasil dipadamkan berkat intervensi segera dari pejabat kecamatan dan pejabat di tingkat kabupaten. Dua insiden terjadi di Wone, yang terletak di bagian selatan perbatasan Loli/Wewewa, pada tahun 1959 dan 1975, tetapi kemudian diikuti dengan perdamaian yang langgeng di antara penduduk desa Loli dan Wewewa yang bertetangga. Insiden ketiga terjadi di Pelli di bagian utara perbatasan Loli/Wewewa pada tahun 1992, dan insiden ini jauh lebih mengendap dalam ingatan masyarakat. Insiden ini pun dengan cepat diselesaikan oleh intervensi segera dari pemerintah Kabupaten, namun sebelumnya telah terjadi penyerangan terhadap beberapa rumah penduduk Wewewa yang tinggal di ibukota kabupaten, sehingga mereka terpaksa mengungsi ke kampung halaman mereka.

Bagi mereka yang selama hidupnya tinggal di Sumba, persiapan yang dilakukan di Ujung Padang dan Dedekadu nyata-nyata merupakan persiapan aksi. Persiapan ini mungkin hanya untuk unjuk kekuatan saja untuk menakut-nakuti, tapi siapa yang dapat mengatakan apa jadinya nanti. Pada hari Selasa 3 November, banyak orang Tionghoa pemilik toko yang membuat rencana mengungsikan anak-anak mereka ke Waingapu di Sumba Timur.

Pada saat inilah polisi dan tentara seharusnya mengambil tindakan untuk menjaga keamanan masyarakat. Dalam persoalan keamanan, Bupati tidak bekerja lewat jajaran asisten seniornya yang sipil, tetapi dapat bertindak seperti dalam lingkungan militer sebagai ‘Penguasa Tunggal’, yang dibantu oleh Kepala kepolisian, Komandan Kodim dan Kepala Kejaksaan Negeri, yang merupakan Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah). Jelas merupakan situasi yang pelik bagi anggota-anggota Muspida lainnya ketika pemimpin mereka adalah salah satu pihak yang mengancam ketertiban masyarakat itu. Baik Kapolres Sumba Barat Letkol (Pol) Drs. S.M. Simatupang maupun Komandan Kodim 1612 Sumba Barat Letkol (Inf) Mulyadi bisa dikatakan sebagai orang luar dengan pengalaman mereka yang singkat di Sumba. Perwira intel tentara Mayor Simarmata telah lama tinggal di Waikabubak dan dapat diharapkan memiliki pengertian yang jauh lebih baik mengenai bahaya dalam situasi semacam itu. Tapi mereka semua kalah pamor bila dibandingkan dengan Bupati Malo, bukan hanya dalam hal pangkat militernya, tetapi juga karena ia adalah satu-satunya orang asli Sumba di antara mereka, sehingga penilaiannya tentang situasi tersebut sulit dibantah.³⁰

Bupati Malo mungkin tidak sadar atau tidak bersedia merenungkan gentingnya situasi ini. Dalam konflik kekerasan, orang Loli akan memiliki satu keuntungan karena kota Waikabubak terletak di kecamatan mereka dan dikelilingi oleh kampung-kampung mereka. Namun, hal ini mungkin hanya terlihat sebagai keuntungan yang kecil mengingat fakta bahwa Loli hanyalah suku kecil yang berjumlah kurang dari 20 ribu penduduk. Jumlah ini jauh di bawah penduduk Wewewa yang berjumlah lebih dari 100 ribu orang, yang tinggal di dua kecamatan di sebelah barat kota. Selain itu, Malo menguasai polisi, tentara dan pamong praja.

Setelah peristiwa tersebut banyak yang beranggapan bahwa Bupati Malo mengatur mobilisasi keluarga besarnya dan penduduk kampung asalnya untuk mengintimidasi lawan-

lawannya, tetapi kemudian ia kehilangan kontrol atas proses yang dimulainya itu. Apa yang terjadi berikutnya memang tidak menguntungkan dirinya.

Di Pinggir Petaka

Sekarang setelah kedua pihak sudah melakukan mobilisasi, ketegangan mencapai puncaknya dan hanya dibutuhkan provokasi kecil untuk mendorong kedua pihak jatuh terjerembab ke jurang malapetaka. Siapapun provokatornya, ia harus menjaga kerahasiaan identitasnya.

Pada dini hari Rabu tanggal 4 November, seorang pedagang kecil dari Loli bernama Johannes Keba Moto diserang oleh orang-orang tak dikenal di sebuah pasar yang ramai di Ombarade, di Wewewa. Perkelahian di pasar bukanlah peristiwa yang jarang terjadi dan Moto pergi ke pasar itu setiap hari Rabu untuk membeli parang tradisional untuk kemudian dijual kembali di Waikabubak. Tapi serangan ini sangat mengherankan karena Moto adalah seseorang yang tidak suka berkelahi, dan para penyerangnya menyamar secara aneh dengan memakai topeng kayu.

Kabar bahwa seseorang yang berasal dari Loli telah diserang di pasar Wewewa lalu menyebar di Waikabubak. Bemo-bemo yang mengantarkan barang dan penumpang ke dan dari kedua kota kecamatan itu hanya dalam tempo 20 menit menjadi penyebar kabar tersebut, dan tidak lama kemudian pasar utama di Waikabubak dipenuhi cerita tentang serangan yang aneh itu. Sekarang para pedagang asal Wewewa seolah berada dalam kandang singa di jantung wilayah Loli. Perkelahian segera meledak dan para pedagang asal Wewewa mengungsi dari kota.³¹

Barulah Bupati Malo dan Muspida mulai terpaksa bertindak. Bagian Penerangan mengirim sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan pengeras suara ke jalan-jalan, menyerukan agar orang tetap tenang dan mengendalikan diri, dan Muspida memecah diri ke dalam dua kelompok. Bupati Malo dan Dandim Mulyadi bertugas menenangkan Wewewa, sementara Kapolres Simatupang dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) bertugas menenangkan Loli. Mereka mengirim pesan kepada Ketua Lero untuk bergabung dengan mereka, tapi ia tidak memberikan tanggapan.³²

Keba Moto belum juga pulang ke rumah. Apakah ia terluka parah? Atau ia sudah terbunuh? Apakah ia diserang karena marganya di desa Bodo Ede adalah salah satu marga pendiri Loli,

dan kebetulan bulan ini adalah bulan suci bagi orang Loli? Sebenarnya, Moto pergi ke kantor polisi untuk melaporkan penyerangan terhadapnya, tapi sebelum hal ini diketahui orang gerombolan-gerombolan orang Loli sudah keburu memenuhi kota dan menyerang rumah orang-orang Wewewa.

Polisi berusaha mengembalikan ketertiban, tapi mereka sulit menunaikan tugas mereka karena kemajemukan target. Di samping itu, pemimpin massa yang tak berbentuk tersebut tidak ingin identitasnya diketahui. Walaupun demikian, beberapa anggota polisi yang dihormati oleh massa mampu menegakkan kontrol di beberapa tempat, namun di tempat lain kerumunan massa secara terbuka menentang polisi lainnya yang dianggap arogan dan korup.³³ Ketika dihadapi polisi, kerumunan massa itu mudah membubar, dan kembali mengelompok di tempat lain untuk memilih sasaran lain.

Pada awalnya orang-orang Wewewa yang hidup di kota kabupaten ini bersembunyi di dalam rumah ketika rumah mereka dilempari batu, namun kemudian mengungsi ketika gerombolan massa berlalu. Selagi keluarga-keluarga Wewewa mengungsi ke kampung halaman mereka di bagian barat, hampir setiap orang lainnya yang memiliki kendaraan meninggalkan Waikabubak, pergi ke arah timur untuk mengungsi ke Anakalang atau Waingapu, atau pergi ke kecamatan di pantai selatan seperti Wanukaka dan Lamboya. Ketakutan mereka sebagian diakibatkan oleh gerombolan massa Loli yang tidak dapat diramalkan kelakuannya, namun penyebab terbesarnya adalah serangan balasan dari Wewewa yang pasti akan terjadi. Para pemilik toko dan pegawai negeri berkemas pergi dan meninggalkan seorang atau dua orang anak muda untuk menjaga rumah sementara anggota keluarga lainnya mengungsi mencari selamat.³⁴

Tidak ada serangan langsung ke kediaman resmi Bupati Malo dan ia mampu menghadapi massa dan berpidato tanpa akibat buruk baginya, tetapi rumah saudaranya, Daud Malo, adalah salah satu rumah yang pertama kali diserang dan segera jelaslah bahwa massa tidak menyerang sembarang orang Wewewa, tapi hanya mengambil sasaran orang-orang yang dekat dengan Bupati Malo. Muncul dugaan di kota bahwa Ketua Lero atau beberapa pendukungnya mengkoordinasi serangan tersebut, dan beberapa orang mengklaim telah melihat daftar rumah yang menjadi target massa. Banyak rumah orang-orang terkemuka dari

Wewewa tidak diserang, terutama rumah mereka yang telah secara terbuka bersikap kritis terhadap Bupati Malo.³⁵

Ketika mulai sore gerombolan massa Loli mulai kembali ke rumah orang-orang Wewewa yang ditinggalkan pemiliknya, membongkar masuk terutama untuk mencuri babi yang disimpan di dalam rumah, tapi tak sedikit pula yang mengambil televisi dan perabotan. Menjelang petang, sebagian besar orang yang tinggal di kota tapi tidak memiliki kendaraan untuk melarikan diri segera diungsikan ke kantor polisi dan markas tentara.

Kapolres Simatupang dan Kajari K. Situmorang SH berkeliling desa-desa di Loli untuk memperingatkan agar jangan melakukan pencurian dan perusakan dan meyakinkan masyarakat bahwa tidak akan ada serangan balasan dari Wewewa. Masyarakat Loli harus menghentikan semua persiapan perang dan percaya bahwa polisi dan tentara akan melaksanakan tugas mereka untuk mencegah serangan. Pada saat bersamaan Bupati Malo dan Dandim Mulyadi berangkat ke Wewewa untuk mencoba menenangkan masyarakat dan mencegah serangan balasan dari Wewewa.

Mereka berdua mengunjungi Wewewa sebanyak empat kali, meminta masyarakat Wewewa untuk menyerahkan persoalan tersebut kepada pejabat yang berwenang, dan menyerahkan pada polisi dan tentara tugas mengembalikan ketertiban dan menghukum mereka yang bersalah atas perusakan harta milik. Banyak orang di Loli curiga bahwa kunjungan ini hanyalah permainan belaka, namun beberapa saksi mata menceritakan bahwa Bupati Malo berpidato meminta dengan sangat di atas atap kendaraannya, dan mengatakan pada orang-orang sesama Wewewa bahwa reputasinya terancam rusak jika mereka menyerang kota kabupaten. Bupati Malo menunjukan parang di lehernya sendiri dan dengan retorika ala Sumba meminta mereka untuk membunuhnya saat itu juga daripada mempermalukan dia lewat pembangkangan mereka.³⁶ Namun, retorikanya sia-sia karena anggota keluarganya sendiri menyatakan bahwa kehormatannya sebagai Bupati bukanlah inti persoalan, melainkan kehormatan mereka sebagai orang Wewewalah dan harta milik merekalah yang harus dipertahankan.

Bupati Malo dan Dandim Mulyadi bersama-sama pergi ke Wewewa empat kali, pada petang hari, tengah malam, dan terakhir pada pukul 4 pagi tanggal 5 November. Ketika akhirnya

jelas bahwa mereka gagal, Malo dan Mulyadi kembali ke kota dengan melewati massa Wewewa yang sudah siap mendekati perbatasan Loli. Tetapi bukannya menyiapkan polisi dan tentara di sepanjang perbatasan atau di pinggiran kota, mereka justru mundur dengan keluarga mereka sendiri ke dalam perlindungan barak polisi dan militer. Meski merupakan satu-satunya pihak yang memiliki senjata api, angkatan bersenjata tidak mengambil tindakan apapun untuk membendung laju pasukan Wewewa.

Kamis Berdarah

Ketika fajar menyingsing pada hari Kamis 5 November itu, sekitar dua ribu orang laki-laki dari Wewewa berbaris melintasi perbatasan menuju Loli. Meski sebagian besar mereka bertelanjang kaki dan mengenakan pakaian tradisional, dengan senjata parang tradisional tergantung di sabuk mereka, orang-orang ini sama sekali bukanlah suku yang primitif. Hampir semuanya adalah penganut Kristen yang memiliki sepatu dan celana panjang, namun mereka memilih berpakaian adat untuk menunjukkan solidaritas etnik. Di bagian luar penutup kepala, mereka semua memakai secarik kain tambahan berwarna putih atau merah yang dibagikan kepada mereka di markas di Ujung Padang untuk menandai diri mereka sendiri sebagai bagian dari pasukan Wewewa.

Sebagian besar dari mereka berbaris di sepanjang jalan aspal dalam kelompok keluarga dengan perasaan tegang, namun mereka memiliki keyakinan tinggi karena menjadi bagian dari massa yang berjumlah besar. Mereka juga yakin bahwa kebenaran ada di pihak mereka. Mereka memandang diri mereka bukan sebagai kekuatan penyerbu, tetapi sebagai unjuk kekuatan untuk mempertahankan hak-hak dan harta benda mereka.³⁷ Tentu saja, ada bahaya, namun jarak dari perbatasan ke pusat kota Waikabubak hanya 6 kilometer dan orang-orang Wewewa yang berbaris itu jelas akan sampai di sana sebelum orang-orang Loli sempat bangun dari tidurnya. Begitu mencapai kota, mereka dapat mengharapkan polisi akan diturunkan, dan akan membantu mereka menduduki kembali rumah orang-orang Wewewa.

Ketika orang-orang itu telah berjalan sejauh 3 km, tingkat bahaya yang mereka hadapi tiba-tiba melonjak. Mereka mulai mendengar bunyi-bunyi meledaknya bambu dan melihat asap tebal membumbung ke angkasa pada kedua sisi jalan. Gelombang kekhawatiran segera menyelimuti pasukan Wewewa yang berjalan sepanjang jalan itu. Mereka sama sekali tidak

mengetahui bahwa ada sebagian kawan mereka sendiri sesama orang Wewewa yang dilengkapi dengan korek api dan jerigen berisi bensin untuk membakar desa-desa Loli di wilayah perbatasan.³⁸ Dua deretan kampung Loli yang terletak di perbukitan di sebelah utara dan selatan jalan telah dibakar, dan seperti diketahui semua orang, sekali atap lalang rumah-rumah Sumba dibakar, tak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan rumah itu. Sekali lagi provokator yang tak diketahui identitasnya secara dramatis mempertinggi tingkat konflik.

Sekarang barisan orang-orang itu berada dalam situasi yang benar-benar berbeda. Bukan hanya keyakinan mereka bahwa kebenaran ada di pihak mereka luluh menjadi keraguan, tapi juga gemuruh suara dan pemandangan desa-desa yang terbakar itu membangunkan seluruh orang Loli sebelum barisan itu sempat mencapai rumah-rumah milik mereka dan perlindungan dari polisi. Sebagian barisan Wewewa itu sekarang berubah haluan. Perubahan yang paling dramatis terjadi pada sekelompok orang Wewewa yang bergerak cukup cepat sehingga dapat mencegah orang-orang Wewewa membakar kampung Gallu Wuraka yang didiami saudara-saudara mereka orang Loli.³⁹ Orang-orang lain yang rumahnya terletak di sebelah barat kota dengan sendirinya berbelok ke rumah mereka dan bersiap-siap mempertahankannya, namun sebagian besar dari 2000 orang yang berbaris itu terus bergerak menuju kota.

Pada saat inilah orang laki-laki Loli berlari-lari atau menunggang kuda untuk mengambil posisi bertahan. Ketika melihat asap kebakaran mengepul dari 10 desa yang terletak dalam satu baris di sebelah utara jalan, dan dua desa lain di sebelah selatan jalan, mereka berkesimpulan bahwa pasukan Wewewa bermaksud mencapai dan membumi-hanguskan kampung Tarung, pusat adat bagi seluruh Loli. Tarung terletak di puncak bukit, sangat dekat dengan pusat kota Waikabubak, dan ada sungai kecil yang mengalir sepanjang sisi barat bukit itu. Pada sekitar pukul 6.30 pagi, pasukan Wewewa telah mencapai sungai itu. Untuk kesekian kalinya ada sekelompok provokator dalam pasukan Wewewa yang menarikan tarian tantangan perang di tepi barat sungai. Dengan mengacungkan parang mereka tinggi-tinggi, mereka mencemooh para penduduk kampung Tarung yang mengawasi mereka dari atas sambil berseru-seru “Giani Toda? Giani Gawi? Giani Bongo?” yang mengulang ejekan-ejekan dalam demonstrasi sebelumnya pada hari Senin.⁴⁰ Biasanya sungai ini kering pada

akhir musim kemarau, namun seolah-olah terjadi keajaiban untuk orang Loli karena hujan lebat sehari sebelumnya mengisi kembali sungai tersebut yang kemudian berfungsi sebagai penghalang. Jalan utama menuju pusat kota Waikabubak melintasi sungai itu di jembatan kecil Dipu Dapu, dan di sinilah pasukan kedua pihak itu berhadapan.

Jembatan itu hanya terletak 100 meter dari kantor polisi, tetapi penegak hukum itu sama sekali tidak mengambil tindakan untuk turun tangan. Pertempuran pertama kali meledak dengan menggunakan tombak, batu, dan lembing lempar yang ampuh yang merupakan keahlian khusus orang Wewewa. Masing-masing pihak berusaha mendesak mundur musuh, namun desakan itu ditahan oleh hujan batu dan senjata lainnya. Tetapi, orang-orang Loli bertempur dengan amarah orang yang mempertahankan rumah dan keluarga mereka, dan setiap menit kekuatan mereka bertambah dengan orang-orang yang baru datang. Setelah kehilangan efek kejutan yang menjadi keuntungan bagi mereka, orang-orang Wewewa sekarang menyadari posisi mereka tidak dapat dipertahankan lagi. Akhirnya, barisan mereka kocar-kacir dan mereka mundur pontang-panting, dikejar oleh orang-orang Loli yang sekarang menghunus parang mereka untuk berkelahi berhadapan satu sama satu.

Seperti orang-orang Wewewa itu, sebagian besar orang-orang Loli yang ikut bertempur adalah para penganut Kristen dan melek huruf, kebanyakan mereka petani, sebagian pegawai kantor, tapi hari ini urusan mereka adalah berperang dan membunuh. Ketika mereka memukul mundur orang-orang Wewewa, orang-orang Loli mengambil tindakan yang melebihi keharusan mempertahankan kampung mereka, mereka bertekad untuk mengalahkan orang-orang Wewewa secara total.

Pertempuran terus berlangsung selama beberapa jam hingga hujan lebat turun di tengah hari. Hujan membawa mendung gelap dan udara dingin dan menghentikan pertempuran sekaligus memberi kesempatan kepada mereka yang saling berperang untuk merenungkan peristiwa yang sedang terjadi. Tentu, sebagian orang-orang Wewewa datang ke Loli untuk berperang dan menghancurkan, namun jelas bahwa banyak orang Wewewa lainnya datang untuk mempertahankan harta milik mereka. Ketika hujan berhenti dan langit kembali cerah, nafsu memburu darah telah menghilang. Eskalasi agresi yang tragis itu telah mencapai titik akhirnya.

Konsekuensi Tragedi

Sesudah hujan berhenti, polisi muncul dari kantor mereka dan turun tangan mengawal sebagian orang-orang Wewewa yang bersembunyi di dalam rumah mereka untuk mengungsi ke Wewewa. Masih ada beberapa insiden kecil yang mewarnai operasi ini.

Polisi menemukan 23 mayat yang tergeletak di sepanjang jalan dan di perumahan sekitarnya. Salah satu kematian yang paling menyedihkan adalah kematian seorang anak laki-laki yang terjebak selagi bersembunyi di bawah tempat tidur bersama dua orang laki-laki dewasa, dan ia mati bersama mereka kena tombak yang ditikamkan secara membabi-butu ke tubuh mereka. Seorang perempuan muda bernama Mariana Ina, karyawan tidak tetap di kantor Departemen Pekerjaan Umum, juga telah mati dibunuh.⁴¹ Jelas bahwa banyak korban yang terbunuh tidak terlibat dalam pembakaran rumah orang-orang Loli, mereka hanyalah orang-orang yang sedang mempertahankan rumah mereka sendiri.

Jumlah korban resmi meningkat ketika empat mayat lagi ditemukan terkubur dalam kuburan yang dangkal.⁴² Ada banyak mayat lainnya yang tidak dimasukkan dalam perhitungan resmi. Di dataran tinggi di sebelah utara jalan di mana para penyerbu yang membakar kampung-kampung itu ditangkis, kabarnya ada 15 mayat orang Wewewa yang dikubur di kuburan yang dangkal, namun mayat-mayat itu tidak pernah ditemukan oleh polisi.⁴³ Di pinggiran selatan wilayah pertempuran, mayat-mayat lainnya hanyut terbawa oleh air sungai. Beberapa hari kemudian, beberapa mayat terlihat di hilir sungai, tapi tak satu pun bisa ditemukan kembali oleh sanak keluarga mereka.

Meski polisi berikhtiar mengambil pimpinan di wilayah pertempuran, namun anehnya mereka memutuskan untuk meninggalkan mayat-mayat di tempat kejadian itu sepanjang malam agar mereka bisa menyelesaikan dokumentasi mereka atas lokasi kematian itu. Pada sore hari Jumat, mayat-mayat itu kemudian dinaikkan ke atas truk DPU, sesuatu yang menyakitkan hati keluarga para korban, karena kendaraan yang dipakai adalah kendaraan pengangkut sampah. Setelah laporan visum disusun oleh para dokter, pada hari Jumat malam mayat-mayat tersebut dibawa ke Rumah Sakit Pemerintah yang berada di pinggiran barat kota, supaya keluarga-keluarga Wewewa bisa datang untuk mengidentifikasi korban-korban tersebut.⁴⁴

Pada tengah hari, hari Sabtu tanggal 7 November, Gubernur Piet Tallo terbang langsung dari Jakarta. Empat peleton Brimob Propinsi juga tiba dari Kupang. Sebelumnya di Jakarta, Gubernur Tallo mengikuti Sidang Istimewa MPR dan membawa serta 2 orang asli Sumba⁴⁵ untuk memberi masukan padanya tentang tradisi lokal. Ini merupakan peristiwa yang unik dalam sejarah Sumba. Konflik antar etnik telah terjadi beberapa kali sebelumnya, meski tingkatnya tidak seperti ini, namun konflik-konflik sebelumnya adalah konflik antar-desa dalam memperebutkan tanah dan perkelahian antar desa ini bisa segera dipadamkan oleh intervensi dari pemerintah kabupaten di Waikabubak. Baru pertama kali inilah konflik yang terjadi dalam wilayah kabupaten telah menjelma menjadi kekerasan dan butuh intervensi dari pemerintah tingkat Propinsi.

Sementara para politikus secara bertahap mencoba memulihkan pemerintahan sipil, penduduk desa juga membereskan soal ini pada tingkat mereka. Meski sekarang polisi telah diperkuat dengan kehadiran Brimob, namun masyarakat Waikabubak masih tetap tegang. Bagian barat kota telah ditinggalkan oleh sebagian besar penduduknya. Kebanyakan rumah-rumah kosong adalah milik orang Wewewa, tapi banyak orang non-Wewewa juga telah mengungsi karena takut akan serangan balasan dari orang-orang Wewewa; baru berminggu-minggu kemudian mereka mulai merasa aman untuk kembali.

Kesenjangan yang luar biasa mengenai jumlah korban yang mati tidak banyak dikomentari dalam pers nasional, namun hal itu menjadi kunci bagaimana masyarakat Sumba memahami pertempuran ini. Ke-27 mayat yang ditemukan adalah mayat orang-orang Wewewa dan tak satupun yang berasal dari Loli. Pada satu sisi, kesenjangan ini dapat berarti bahwa orang-orang Wewewa akan kembali untuk membalas dendam. Pada sisi lain, kesenjangan jumlah korban ini dijelaskan oleh orang-orang Loli sebagai akibat kekuatan gaib. Orang-orang Wewewa telah melanggar janji yang dibuat pada tahun 1992 bahwa mereka tidak akan menginvasi Loli lagi, dan pelanggaran sumpah itu memerosokkan mereka ke dalam perang yang kemudian menjadi bencana bagi mereka.⁴⁶ Logika ini tampaknya cukup masuk akal, bagi banyak orang Wewewa sekalipun, khususnya bagi mereka yang berbaris di sepanjang jalan dan merasa bahwa mereka telah ditipu dan dikhianati oleh orang-orang yang mengorganisir pembakaran kampung-kampung Loli.

Masyarakat Loli setidaknya bisa merasa lega karena mereka telah mampu mempertahankan diri, sekalipun ketika sistem pemerintahan, polisi dan tentara tidak membela mereka. Kendati banyak pemimpin agama dan aktivis reformasi menuntut agar aksi-aksi kejahatan yang terjadi harus ditindak-lanjuti di pengadilan, namun hanya segelintir dari mereka yang berangan-angan bahwa hal itu akan terwujud. Polisi, tentara, dan kantor Kejaksaan masih berfungsi dalam gaya Orde Baru, sehingga bisa diduga bahwa Bupati Malo dan orang-orang yang dekat dengannya akan 'kebal hukum'. Dan mengingat fakta bahwa Gubernur secara erat melibatkan diri dalam peristiwa ini, tampaknya Ketua Lero dan orang-orang terdekatnya kemungkinan besar juga akan lolos dari hukum.

Di Wewewa sendiri muncul banyak kepahitan dan kemarahan. Tak sedikit orang Wewewa yang disibukkan oleh upaya mengatasi tragedi yang menghinggapinya mereka pribadi dan gangguan dalam kehidupan mereka, dan masyarakat terpecah secara tajam ke dalam faksi pro-Malo dan anti-Malo. Dengan bersedih hati mereka hanya bisa menyebut pepatah Melayu, *gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah*.

Pada awalnya, demonstrasi Waikabubak yang menyoroti korupsi dalam ujian calon pegawai negeri tampaknya hanya meniru-niru tuntutan reformasi yang bergema di daerah-daerah lain di Indonesia. Akhirnya demonstrasi itu telah memicu konflik merusak di dalam pemerintahan Orde Baru yang memberikan dorongan kuat pada momentum tuntutan reformasi di Sumba Barat.

Walaupun Bupati Malo dan Ketua Lero akan dirugikan oleh peristiwa yang telah terjadi itu, mereka adalah orang-orang yang pada waktunya akan berlalu dari panggung politik. Kerusakan kelembagaan dalam kehidupan politik tampaknya akan berakibat lebih besar. Melihat ke belakang pada bulan Oktober 1998, saat itu para politisi sipil dari Golkar dan perwira militer sama-sama berharap bisa bertahan dalam pemilu 1999 dalam keadaan baik. Sekarang, pada pertengahan November 1999, prestise mereka semua telah cacat.

Sistem politik Orde Baru di Sumba Barat bukan hanya gagal mempertahankan perdamaian sipil, namun kericuhan internalnya sendiri juga telah menciptakan kekacauan masyarakat dan tragedi pada skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perseteruan sipil-militer mengenai

pembagian kue kekuasaan mulai tampak seperti sekaratnya sistem politik yang sudah tidak dipercaya lagi.

Catatan

¹ **Ucapan terima kasih:** Kajian tentang Sumba Barat ini tidak akan terlaksana tanpa bantuan dari banyak sahabat dan narasumber. Kedua penulis tinggal dan bekerja di Sumba Barat pada tahun 1968-69 dan 1972-75 dan terus memelihara kontak dengan daerah ini selama 30 tahun berikutnya.

Kami berterima kasih kepada *Pos Kupang* (PK), surat kabar terkemuka di propinsi ini, yang mempublikasikan berita-berita utamanya melalui internet selama periode ini. Berita-berita tersebut menjadi sumber informasi berharga yang memungkinkan terlaksananya kajian ini.

Secara khusus kami berterima kasih kepada Setwilda Sumba Barat yang telah memberikan akses pada koleksi kliping surat kabar mereka.

Empat kunjungan lapangan yang singkat pada bulan Maret dan Juli 1999, Juli 2000, dan Juni 2001 telah memungkinkan wawancara dengan beberapa narasumber kunci.

² Ejaan alternatif, *Weyewa* dan *Lauli*, digunakan dalam kepustakaan antropologi untuk kedua kelompok etnik ini, sementara dalam sumber-sumber sejarah istilah *Waidjewa* lazim digunakan. Dalam makalah ini, kami mengikuti penggunaan resmi yang sekarang dipakai, 'Wewewa' dan 'Loli', yang juga merupakan istilah yang digunakan dalam berbagai liputan media tentang peristiwa yang dibicarakan di sini.

³ Ini merupakan pola umum di NTT. Pecahnya kekerasan di Ende pada bulan Februari tahun 1997 dan Kupang pada bulan Desember 1998 juga hanya terbatas pada satu hari. Pola kekerasan yang berlarut-larut baru berkembang pada akhir tahun 1999 seiring dengan kedatangan milisi Timor-Timur.

⁴ Pos Pupang 13 November 1998 “Kamis Berdarah karena pertarungan politik” <ad/hi> dan Pos Kupang 9 November 1998 “Kamis Berdarah diduga sarat muatan politis” <ery/ady/gem>.

Ini segera disusul oleh bantahan dari sumber-sumber militer, Pos Kupang 9 November 1998 (dalam artikel yang sama), dan pernyataan resmi mengenai perpecahan itu oleh Bupati Malo dan Ketua Lero sendiri, Pos Kupang 15 November 1998 “Sejak semula kami bergandengan tangan” <gem/ama>

⁵ Pejabat sementara sebagai Bupati tidak didaftarkan dalam tabel ini. Daftar lengkap dapat dilihat di B.Michael Beding dan S.Indah Lestari Beding, 2002, “Mozaik Sumba Barat, Rekaman Jurnalistik”, Pemda Sumba Barat. P.67

⁶ Proses pemerintahan di Sumba Barat pada awal periode Orde Baru digambarkan dalam David Mitchell, “Wanokalada: A Case Study in Local Administration”, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Juli 1970, hal. 76-93.

⁷ Sumba Barat dalam Angka, 1993, BPS Cabang Sumba Barat.

⁸ Mengenai perang tradisional lihat Janet Hoskins, “The Heritage of Headhunting: Ritual, Ideology and History on Sumba 1890-1990”, dalam “Headhunting and the Social Imagination in Southeast Asia”, ed. J. Hoskins, Stanford CA.

⁹ Mengenai periode kolonial lihat Istutiah Gunawan “Hierarchy and Balance”, Canberra 2000, Resaerch School of Pacific Studies, Bab 2—Environment and Historical Background.

¹⁰ Pos Kupang, Selasa, 4 April 1995.

¹¹ Penjelasan tentang peristiwa ini muncul dalam Herman Louk, “Umbu Djima dan Patah Tombak”, Pos Kupang, 24 Januari 1999.

¹² dr. Lapu Muku, mantan ketua DPD Golkar Sumba Barat. Informasi ini tidak disebut di media massa, namun sudah awam diketahui oleh kalangan elit.

¹³ Pada tanggal 3 April 1995, Rudolf Malo terpilih sebagai Bupati untuk masa jabatan 1995-2000 dalam rapat paripurna khusus DPRD II. Malo meraih 18 suara dari antara 29 anggota

Dewan, Drs. Agustinus Dapabeda meraih 5 suara, Drs. Umbu K Anagoga meraih 6 suara (Pos Kupang, 24 Desember 1998).

¹⁴ Wawancara dengan Rudolf Malo, Waikabubak, Maret 1999.

¹⁵ Wawancara dengan beberapa informan, Waikabubak, Maret dan Juli 1999.

¹⁶ Wawancara dengan Rudolf Malo. Para pendukungnya juga mempublikasikan daftar 6 prestasi terbesar dalam pemerintahannya dalam Pos Kupang, 15 Februari 1998, yaitu (1) Operasi Pasola I untuk mengurangi pencurian ternak, (2) 8 program pembangunan pertanian yang mengarah pada peningkatan produksi kacang mente, pisang, singkong, dan ubi rambat, (3) penggalakan kapal ferry Bima-Waikelo, (4) mengawasi penyempurnaan pelebaran lapangan udara Tambolaka dan memulai pelayanan penerbangan Fokker 27, (5) aktivitas pembangunan jalan yang padat karya di seluruh kabupaten, (6) tidak menerima tanda mata adat pada waktu melakukan kunjungan dinas ke desa-desa.

¹⁷ Dalam wawancara, Malo membantahnya, dengan mengatakan bahwa pemilihan perwira militer ini diprakarsai oleh para atasan militernya, namun informan lain di Waikabubak menganggap informasi Malo ini tidak dapat dipercaya.

¹⁸ Wawancara dengan Rudolf Malo, Maret 1999.

¹⁹ Wawancara dengan Bernardus Dangga, mantan Camat Wewewa Timur, Maret 1999. Lihat juga PK 14 Januari 1999 laporan wawancara dengan Umbu Djima

²⁰ Pos Kupang, 29 Oktober 1998, "Nedi Kaka Mengaku Tidak Ikut Tes CPNS"

²¹ Pos Kupang, 27 Oktober 1998, "Waikabubak Digoyang Unjuk Rasa" dilengkapi dengan wawancara dengan Marthen Ngailu Toni dan Alex Dapawole. Organisasi penyelenggara demo adalah FPDPR, *Forum Pemuda Demokratis Pencinta Reformasi*.

²² Rincian diberitakan di Pos Kupang, 30 Oktober 1998, "SK Gubernur NTT dinilai cacat". Berita ini dilengkapi dengan wawancara dengan Marthen Ngailu Toni dan Alex Dapawole.

²³ Wawancara dengan saksi mata Lede Manupadaka, Waikabubak, Juli 1999.

-
- ²⁴ Lihat diskusi tentang ‘nama keras’ (bahasa Indonesia), atau *ngara katto* (bahasa Wewewa) dalam Kuipers, Joel ‘Language, Identity and Marginality in Indonesia’ Cambridge UP, 1998. Para demonstran sebenarnya keliru ketika mengira bahwa nama kecil Rudolf Malo adalah Mete, karena Mete Malo nama umum di mana Mete dapat dipakai dengan maksud menghina. Sebenarnya nama Sumbanya adalah Rua Lede, di mana Rua adalah nama yang dipakai jika bermaksud untuk menghina. Kekeliruan ini muncul karena tidak ada nama keluarga dalam nama-nama tradisional Sumba dan, sesuai kebiasaan yang banyak dipakai, Rudolf Malo dan saudara-saudara kandungnya mengambil nama pribadi ayah mereka sebagai nama keluarga. Lihat komentar dari seorang pendukung Rudolf Malo, Kris Bobo, di Pos Kupang, 3 November 1998.
- ²⁵ Dalam tradisi Sumba, orang berhak merasa tersinggung apabila *ngara katto* digunakan di depan umum, tetapi biasa dalam strategi politik apabila seseorang yang telah dihina itu memutuskan kapan ia bertindak karena dihina atau kapan menganggap penghinaan itu sebagai angin lalu.
- ²⁶ Wawancara dengan Rudolf Malo, Maret 1999.
- ²⁷ Berita Pos Kupang, tanggal 3 November 1998 berjudul “Bupati Malo Didatangi 500 Anggota Keluarganya” dilengkapi dengan informasi dari berbagai laporan saksi mata.
- ²⁸ Wawancara dengan Kris Bobo, Ujung Padang, Wewewa, Juli 1999.
- ²⁹ Wawancara dengan Lede Manupadaka, Loli, Juli 1999, tetapi informasi ini tidak dilaporkan di kalangan umum; lihat wawancara dengan Rudolf Malo di Pos Kupang 8 November 1998, “Nama nenek moyang tabu disebut”.
- ³⁰ Wawancara dengan Bernardus Dangga, mantan Camat Wewewa Timur, Elopada, Juli 1999.
- ³¹ Pos Kupang, 5 November 1998, ‘Isu Manusia Bertopeng Hangatkan Waikabubak – Bupati Malo: Jangan terpancing isu’.
- ³² Pos Kupang, 5 November 1998, “Isu Manusia Bertopeng Hangatkan Waikabubak – Bupati Malo: Jangan Terpancing Isu”.

-
- ³³ Wawancara dengan Gerardus Manyela, wartawan Pos Kupang, yang tulisannya ditandai dengan nama <gem>
- ³⁴ Wawancara dengan beberapa keluarga etnik Tionghoa.
- ³⁵ Yang paling menonjol adalah Ketua PDI-P J.L. Keremata dan mantan Ketua DPRD II, J.B. Lalo, yang termasuk di antara banyak keluarga Wewewa yang tak terusik.
- ³⁶ Wawancara dengan saksi mata JA, Kampung Elopada, Wewewa Timur, Maret 1999.
- ³⁷ Wawancara dengan JA
- ³⁸ Wawancara dengan JA
- ³⁹ Wawancara dengan JA
- ⁴⁰ Wawancara dengan saksi mata MWT, di Tarung, Loli, Maret 1999.
- ⁴¹ Pos Kupang, 8 November 1998, 'Perlawanan Mariana Ina yang sia-sia'
- ⁴² Tiga mayat ditemukan terkubur di Waikarou di sebelah selatan tempat pertempuran utama (Pos Kupang 12 November 1998 'Ditemukan lagi mayat korban Kamis Berdarah') dan satu mayat terkubur dalam liang yang dangkal di Ubu Pede di sebelah utaranya (Pos Kupang 15 November 1998)
- ⁴³ Wawancara dengan saksi mata MGM, Tebara, Loli. Maret 1999.
- ⁴⁴ Pos Kupang 8 November. 1998 dan wawancara dengan dr Dedy Lapoe Moekoe dan Cyprianus M Leyn CSsR, Maret dan Juli 1999.
- ⁴⁵ Umbu Mehangkunda, wakil MPR dari Sumba Timur, dan Umbu S. Samapaty SH, seorang pengacara di Jakarta, anak Umbu Remu Samapaty, Bupati Sumba Barat yang kedua.
- ⁴⁶ Beberapa orang curiga bahwa orang-orang Loli menyembunyikan korban tewas mereka, tapi jika hal ini benar-benar terjadi, maka rahasia itu sangat tersimpan rapi. Dalam wawancara (Maret 1999), pendeta Katolik Cyprianus M. Leyn CSsR mengatakan bahwa 4 korban tewas dari Loli telah dilaporkan kepadanya oleh beberapa anggota jemaatnya.